



Tantangan dan Solusi Pendidikan Islam Multikultural

Zulkifli

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Inodonesia

Email: kifli.zul2025@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tantangan dan solusi pendidikan Islam multikultural dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi instrumen pembentuk sikap toleran, inklusif, dan terbuka terhadap perbedaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti eksklusivisme keagamaan, rendahnya literasi multikultural guru, serta resistensi ideologis terhadap pluralisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan menganalisis literatur pendidikan Islam dan teori multikulturalisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam ke arah multikultural menuntut perubahan paradigma, kurikulum, peran guru, budaya sekolah, serta dukungan kebijakan negara. Pendidikan Islam multikultural bukan hanya ideal normatif, melainkan kebutuhan strategis untuk menciptakan masyarakat berkeadaban dalam bingkai kebhinekaan.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Multikulturalisme, Tantangan, Solusi, Inklusivitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya dan agama tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, dan lima agama besar yang diakui negara, bangsa ini secara faktual hidup dalam realitas sosial yang sangat majemuk (Komnas HAM, 2018). Kondisi ini menuntut sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam, untuk bersikap terbuka dan responsif terhadap keragaman yang ada. Pendidikan Islam tidak boleh eksklusif atau sekadar menjadi sarana transmisi nilai-nilai normatif keagamaan secara tekstual, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai multikulturalisme yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Dalam perkembangan sosial kontemporer, isu-isu intoleransi, diskriminasi, bahkan radikalisme yang mengatasnamakan agama menunjukkan bahwa masih banyak praktik pendidikan yang belum mampu menjembatani keberagaman dengan prinsip-prinsip Islam yang inklusif. Fenomena ini semakin menegaskan pentingnya pendidikan Islam multikultural yang dapat menciptakan ruang dialog, membangun sikap saling menghormati antaridentitas, dan mendorong peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. Pendidikan Islam yang demikian sejalan dengan semangat Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (Q.S. Al-Anbiya: 107), yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan universal.

Pendidikan Islam multikultural bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan penegasan kembali terhadap prinsip dasar Islam yang menghargai perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (Q.S. Al-Hujurat: 13). Ayat ini

mengisyaratkan bahwa pluralitas merupakan keniscayaan yang harus dikelola melalui pendekatan pendidikan yang bijak, terbuka, dan kontekstual.

Sayangnya, implementasi pendidikan Islam dalam konteks multikultural masih menghadapi banyak tantangan. Kurikulum yang digunakan di banyak lembaga pendidikan Islam masih cenderung normatif dan belum secara sistematis memuat dimensi pluralisme dan multikulturalisme. Proses pembelajaran lebih banyak menekankan pada hafalan doktrin daripada pengembangan kesadaran kritis dan empati sosial terhadap realitas keragaman. Hal ini diperparah oleh minimnya literasi guru tentang multikulturalisme serta keterbatasan pelatihan yang mendukung pedagogi inklusif (Azra, 2007).

Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan untuk memahami agama secara skripturalistik tanpa melihat konteks sosial di mana ajaran tersebut diimplementasikan. Pemahaman sempit ini berpotensi melahirkan eksklusivisme teologis yang tidak sejalan dengan semangat multikultural. Akibatnya, dalam beberapa kasus, pendidikan Islam malah menjadi sarana reproduksi intoleransi terhadap kelompok yang berbeda, baik dalam hal agama, mazhab, maupun etnis (Mahfud, 2011). Kondisi ini tentu menjadi ironi bagi pendidikan Islam yang sejatinya harus menjadi pilar moral dan spiritual dalam membangun masyarakat yang adil dan damai.

Urgensi penerapan pendidikan Islam multikultural semakin tinggi ketika melihat kenyataan bahwa generasi muda hidup dalam masyarakat yang kompleks dan sarat dengan arus globalisasi, media sosial, dan ideologi-ideologi transnasional. Tanpa bekal kesadaran multikultural yang kuat, mereka mudah terpengaruh oleh narasi-narasi intoleran dan eksklusif yang tersebar luas di dunia maya. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun nalar keagamaan yang moderat dan inklusif, terutama melalui kurikulum yang kritis dan partisipatif (Abdullah, 2010).

Pendidikan Islam multikultural seharusnya tidak hanya menjadi wacana akademik, melainkan diimplementasikan dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, model pembelajaran, hingga interaksi sosial di lingkungan sekolah. Penerapan nilai-nilai seperti musyawarah, tolong-menolong, keadilan, dan persaudaraan universal dalam pendidikan Islam dapat menjadi titik temu antara nilai keislaman dan prinsip-prinsip multikultural. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam harus menjadi arena pembentukan karakter yang terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan.

Guru sebagai agen utama pendidikan memegang peran penting dalam mewujudkan pendidikan Islam yang multikultural. Namun kenyataannya, banyak guru yang belum dibekali kompetensi pedagogik multikultural, baik dari sisi teori maupun praktik. Guru sering kali terjebak dalam pola ajar yang monolitik dan tidak sensitif terhadap keragaman latar belakang siswa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru dalam bidang pendidikan multikultural berbasis Islam menjadi agenda mendesak untuk mendorong terwujudnya transformasi pendidikan yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia (Tilaar, 2004).

Lebih jauh lagi, budaya sekolah juga harus dikembangkan menjadi budaya yang mengakomodasi nilai-nilai multikultural. Hal ini bisa diwujudkan melalui program-program sekolah yang mendorong kerja sama lintas budaya, dialog antaragama, serta keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan pendidikan. Lingkungan belajar yang inklusif akan memperkuat karakter peserta didik dalam menghargai perbedaan dan menghindari sikap-diskriminatif maupun stereotip negatif terhadap kelompok lain.

Tidak kalah penting adalah peran negara dalam menciptakan regulasi dan kebijakan pendidikan yang mendorong inklusivitas dan pengakuan terhadap keragaman. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan harus secara sinergis mengembangkan panduan kurikulum dan pelatihan guru yang berbasis nilai-nilai Islam

moderat dan multikultural. Dukungan kebijakan ini menjadi faktor penentu agar pendidikan Islam tidak tertinggal dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat plural.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan potensi tersebut, pendidikan Islam multikultural menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan ini bukan hanya upaya memperkuat identitas keislaman, tetapi juga jalan untuk membangun perdamaian, mencegah konflik berbasis SARA, serta menanamkan kesadaran kewargaan yang inklusif dan demokratis. Kajian tentang tantangan dan solusi pendidikan Islam multicultural menjadi penting untuk merumuskan arah pendidikan masa depan yang tidak hanya religius, tetapi juga humanis dan transformatif.

Dengan demikian, kajian ini akan mengkaji secara sistematis tantangan-tantangan utama yang dihadapi pendidikan Islam dalam konteks masyarakat multikultural, sekaligus merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan baik pada level konseptual, kebijakan, maupun praktik pendidikan. Harapannya, pendidikan Islam dapat semakin berperan dalam membangun masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan beradab dalam kerangka kebhinekaan.

Adapun tujuan dari penulisan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi pendidikan Islam dalam lingkungan masyarakat yang multikultural.
2. Untuk menawarkan solusi konseptual dan praktis guna meningkatkan efektivitas pendidikan Islam dalam merespons keragaman budaya dan sosial.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji wacana konseptual dan reflektif mengenai pendidikan Islam dan multikulturalisme, terutama dalam menjelaskan tantangan dan merumuskan solusi yang bersifat teoritik dan aplikatif. Studi kepustakaan memungkinkan penelusuran terhadap pemikiran-pemikiran tokoh dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai dasar analisis.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah seperti buku referensi, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pendidikan yang membahas tema pendidikan Islam, multikulturalisme, dan transformasi sosial. Data dikumpulkan melalui proses dokumentasi dan dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis), yakni mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan tantangan serta strategi-solusi pendidikan Islam multikultural.

Langkah analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) **reduksi data** untuk menyaring informasi yang relevan; (2) **penyajian data** dalam bentuk kategorisasi tematik seperti tantangan dan solusi; dan (3) **penarikan kesimpulan** berdasarkan sintesis antara temuan literatur dan konteks sosial pendidikan Islam di Indonesia. Validitas data diperkuat melalui **triangulasi sumber**, dengan membandingkan literatur dari berbagai disiplin dan perspektif baik Islam klasik maupun pendidikan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan proses internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam diri peserta didik melalui sistem pengajaran yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Abuddin Nata (2013), pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada transfer ilmu agama secara normatif, tetapi juga menyangkut pembentukan

kepribadian yang utuh (insan kamil) yang mencerminkan akhlak, etika, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam idealnya mencakup dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.

Dalam konteks modern, pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang multikultural. Oleh karena itu, pendidikan Islam dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kohesi sosial, integrasi nasional, dan toleransi antar umat beragama dan antar kelompok budaya. Pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan transformasi sosial selama ia dijalankan dalam kerangka nilai-nilai inklusivitas, humanisme, dan keadilan sosial (Azra, 2007).

Multikulturalisme merupakan sebuah paham yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dikembangkan. Dalam dunia pendidikan, pendekatan multikultural bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, toleransi, dan keterampilan sosial peserta didik agar mereka mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam (Banks, 2008). Pendidikan multikultural menolak dominasi satu budaya atas yang lain, dan sebaliknya mendorong dialog, saling pengertian, serta keadilan antar kelompok.

Menurut Parekh (2000), pendidikan multikultural merupakan respons terhadap ketimpangan sosial dan dominasi budaya tertentu yang berimplikasi pada marginalisasi kelompok minoritas. Dengan kata lain, pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi sebagai sarana kognitif, tetapi juga sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang mengarah pada tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung prinsip kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan pengakuan atas identitas kolektif dan individu.

Konsep pendidikan Islam multikultural merupakan integrasi antara nilai-nilai ajaran Islam dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Dalam paradigma ini, Islam dipandang sebagai agama yang secara fundamental mengakui pluralitas dan keberagaman. Al-Qur'an menegaskan bahwa keragaman merupakan sunnatullah (Q.S. Al-Hujurat: 13; Q.S. Ar-Rum: 22), dan bahwa tidak ada paksaan dalam agama (Q.S. Al-Baqarah: 256). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif bagi pengembangan pendidikan Islam yang terbuka terhadap perbedaan.

Pendidikan Islam multikultural bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada peserta didik bahwa hidup dalam masyarakat plural menuntut toleransi, sikap saling menghormati, serta kemampuan untuk berdialog dan bekerja sama lintas batas identitas. Dalam kerangka ini, peserta didik dibentuk menjadi pribadi yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga toleran, inklusif, dan bertanggung jawab secara sosial (Abdullah, 2010).

Implementasi pendidikan Islam multikultural memerlukan transformasi dalam berbagai aspek, mulai dari kurikulum, strategi pembelajaran, hingga budaya sekolah. Kurikulum tidak boleh hanya berisi doktrin keagamaan yang sempit, tetapi juga harus memuat wacana-wacana sosial, budaya, dan kemanusiaan yang memperkuat nilai-nilai keislaman universal. Strategi pembelajaran harus mendorong dialog antar peserta didik, pembelajaran berbasis proyek sosial, dan studi lintas budaya.

B. Urgensi Pendidikan Islam Multikultural

Urgensi pendidikan Islam multikultural tidak terlepas dari realitas kontemporer yang ditandai dengan meningkatnya gejala intoleransi, kekerasan berbasis agama, dan polarisasi identitas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merembes ke dunia pendidikan. Dalam beberapa kasus, lembaga pendidikan Islam justru menjadi tempat berkembangnya paham eksklusivisme dan doktrin yang sempit.

Menurut Mahfud (2011), pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas agar mampu menjawab tantangan globalisasi dan fragmentasi sosial. Pendidikan Islam multikultural dapat menjadi sarana efektif dalam membangun

kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan modal sosial untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Pendidikan Islam multikultural juga menjadi penting dalam membentuk generasi muda Muslim yang tidak hanya paham terhadap ajaran agamanya, tetapi juga memiliki kompetensi sosial untuk hidup dalam dunia yang majemuk. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam menjadi instrumen rekonsiliasi, bukan alat justifikasi untuk kekerasan dan intoleransi.

Pendidikan Islam multikultural merupakan pendekatan yang relevan dan strategis untuk menjawab tantangan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Melalui integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip multikulturalisme, pendidikan Islam dapat menjadi sarana membentuk generasi yang religius, toleran, dan humanis. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan upaya serius dalam reformasi kurikulum, penguatan kapasitas guru, pembangunan budaya sekolah yang inklusif, serta dukungan kebijakan dari pemerintah dan masyarakat.

C. Tantangan Pendidikan Islam Multikultural

Pendidikan Islam multikultural merupakan pendekatan yang bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam proses pendidikan dengan landasan teologis dan pedagogis Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik yang bukan hanya religius, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk. Namun, idealitas ini dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, kultural, dan pedagogis yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam lembaga pendidikan Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik dan budaya masyarakat Muslim secara luas.

1. Paradigma keislaman yang monolitik dan eksklusif

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pendidikan Islam multikultural adalah masih dominannya paradigma keislaman yang monolitik dan eksklusif di sebagian besar lembaga pendidikan. Pemahaman keagamaan yang berkembang sering kali tidak memberi ruang pada keragaman tafsir, madzhab, dan praktik keislaman. Dalam banyak kasus, Islam diajarkan dalam bentuk yang rigid dan legalistik, lebih menekankan pada aspek syariat lahiriah ketimbang nilai-nilai etis universal seperti kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan (Abdullah, 2010).

Pemahaman keagamaan semacam ini membuat peserta didik terjebak dalam cara berpikir dikotomis: "Islam vs non-Islam", "kami vs mereka", dan "benar vs salah", yang pada gilirannya menghambat penginternalisasian nilai-nilai multikultural dalam kehidupan mereka. Pendidikan yang hanya mengajarkan Islam dari satu perspektif tunggal, tanpa membuka ruang diskusi tentang pluralitas pemikiran dalam Islam itu sendiri, akan menghasilkan sikap keagamaan yang fanatik dan sempit.

2. Minimnya literasi multikultural di kalangan pendidik

Guru atau pendidik merupakan aktor sentral dalam proses pendidikan, namun banyak di antara mereka yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendidikan multikultural. Literasi multikultural di kalangan guru sering kali terbatas pada wacana permukaan, tidak disertai kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilainya secara pedagogis ke dalam pembelajaran. Hal ini diperparah oleh sistem pendidikan guru yang masih berorientasi pada kurikulum normatif, yang menekankan hafalan materi keagamaan dan belum banyak menyentuh isu-isu kontekstual seperti pluralitas budaya dan agama.

Keterbatasan ini membuat guru sulit mengelola keberagaman peserta didik di dalam kelas, apalagi untuk menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan pembelajaran. Padahal, pendidikan multikultural menuntut guru tidak hanya memahami konsep keberagaman, tetapi juga memiliki sensitivitas kultural, empati sosial, dan keterampilan komunikasi lintas budaya (Banks, 2008). Tanpa kapasitas ini, proses pembelajaran justru bisa menjadi ruang reproduksi stereotip, prasangka, bahkan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda.

3. Kurikulum yang belum responsif terhadap keberagaman sosial-budaya

Kurikulum pendidikan Islam di banyak sekolah masih bersifat sentralistik, berorientasi pada aspek kognitif dan doktrinal, serta minim menyentuh isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan dialog antarbudaya. Materi-materi pelajaran keagamaan cenderung berfokus pada fiqh, tauhid, dan akhlak dalam pengertian konvensional, tanpa memperluas cakupannya pada konteks kebangsaan, kewargaan global, dan kemanusiaan universal. Hal ini menyebabkan peserta didik tidak memiliki kesadaran kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya, termasuk isu diskriminasi, ketimpangan, dan intoleransi yang justru sangat relevan dalam konteks masyarakat majemuk (Mahfud, 2011).

Sebagai konsekuensinya, lembaga pendidikan Islam gagal memanfaatkan kurikulum sebagai sarana transformasi sosial. Kurikulum seharusnya mampu menjadi instrumen yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang aktif, toleran, dan bertanggung jawab di tengah keragaman. Namun, ketika isi kurikulum tidak menyentuh aspek-aspek ini, maka pendidikan Islam menjadi teralienasi dari dinamika masyarakatnya sendiri.

4. Kuatnya resistensi kultural dan ideologis terhadap gagasan multikulturalisme

Multikulturalisme sebagai pendekatan pendidikan kerap kali disalahpahami dalam komunitas Muslim sebagai upaya sekularisasi, relativisme nilai, bahkan pengaburan identitas keislaman. Di beberapa kalangan, multikulturalisme dianggap sebagai proyek Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan semacam ini tidak hanya berkembang di masyarakat awam, tetapi juga merasuki sebagian pendidik dan pengambil kebijakan pendidikan. Akibatnya, pendidikan Islam multikultural sering ditolak atau dicurigai sebagai bentuk ‘penyimpangan’ dari tradisi keislaman yang dianggap ‘murni’.

Pada hal, Islam secara teologis justru memiliki fondasi kuat untuk mendukung nilai-nilai multikulturalisme. Ayat-ayat Al-Qur’an seperti QS. Al-Hujurat: 13 yang menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa merupakan ciptaan Tuhan untuk saling mengenal, atau QS. Al-Baqarah: 256 yang menegaskan prinsip “tidak ada paksaan dalam agama”, menunjukkan bahwa pluralitas adalah fitrah kemanusiaan yang harus dihargai. Sayangnya, ketika pemahaman keagamaan direduksi menjadi simbol-simbol formal dan semangat eksklusivitas, maka ayat-ayat semacam ini kehilangan signifikansinya dalam praktik pendidikan.

5. Lingkungan sosial-politik yang tidak mendukung narasi toleransi

Lingkungan sosial-politik yang sarat dengan isu-isu sektarian, polarisasi agama, dan politisasi identitas juga menjadi tantangan serius bagi pendidikan Islam multikultural. Narasi kebencian, ujaran intoleransi, dan penggiringan opini terhadap kelompok agama atau etnis tertentu sering kali diproduksi dan disebarkan secara masif melalui media sosial, bahkan oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh keagamaan. Situasi ini menciptakan atmosfer sosial yang tidak kondusif untuk menanamkan nilai-nilai multikultural.

Lembaga pendidikan Islam, terutama di tingkat dasar dan menengah, sering kali tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk mengonfrontasi narasi-narasi ini. Sebagian justru memilih untuk netral atau apolitis agar tidak dicurigai berpihak. Padahal, pendidikan semestinya bersikap kritis terhadap ketidakadilan dan mampu menjadi agen transformasi sosial. Jika

lingkungan pendidikan terus dibatasi oleh ketakutan terhadap resistensi sosial dan politik, maka nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme tidak akan berkembang secara utuh di dalamnya.

D. Solusi Pendidikan Islam Multikultural

Menghadapi berbagai tantangan yang menghambat berkembangnya pendidikan Islam multikultural, dibutuhkan serangkaian solusi strategis dan sistematis yang mampu menata kembali paradigma, sistem, kurikulum, hingga praktik pedagogis dalam pendidikan Islam. Solusi ini tidak hanya bersifat reformatif, tetapi juga transformatif—yaitu tidak sekadar memperbaiki yang sudah ada, tetapi membangun sistem baru yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat plural.

1. Reorientasi paradigma pendidikan islam ke arah humanisme transendental

Solusi paling fundamental bagi pendidikan Islam multikultural adalah mengubah paradigma dasarnya dari pendekatan normatif-dogmatis ke arah humanisme transendental. Humanisme transendental merupakan pendekatan yang tidak mengabaikan nilai-nilai ilahiah dalam Islam, tetapi sekaligus menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses transformasi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak sekadar mengajarkan dogma agama, tetapi juga membentuk peserta didik menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama manusia, lingkungan sosial, dan nilai-nilai keadilan (Abdullah, 2010).

Paradigma ini menuntut rekonstruksi teologis dalam pemahaman terhadap ajaran Islam—dari teologi eksklusif menuju teologi inklusif. Ajaran Islam harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip universalnya seperti rahmah (kasih sayang), 'adl (keadilan), tasamuh (toleransi), dan ta'awun (kerja sama). Pemahaman semacam ini dapat menjadi landasan filosofis untuk membangun visi pendidikan yang menghargai perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, bahasa, maupun sosial-ekonomi.

2. Penguatan kompetensi guru sebagai agen multikulturalisme

Guru memiliki peran strategis sebagai fasilitator pembelajaran, agen perubahan sosial, sekaligus panutan moral bagi peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan literasi multikultural di kalangan guru menjadi solusi yang tidak bisa ditunda. Pendidikan dan pelatihan guru (pre- service dan in-service) harus dirancang ulang agar tidak hanya mencetak pengajar yang cakap dalam aspek kognitif keagamaan, tetapi juga memiliki sensitivitas budaya, empati sosial, serta keterampilan pedagogis dalam mengelola kelas yang heterogen.

Pelatihan semacam ini tidak hanya mencakup wawasan teoritik tentang multikulturalisme, tetapi juga praktik praktis seperti manajemen konflik, teknik fasilitasi diskusi lintas-budaya, dan penggunaan bahan ajar yang inklusif. Guru juga perlu dibekali dengan pemahaman interdisipliner—menggabungkan ilmu pendidikan, sosiologi, antropologi, dan studi keislaman—agar mampu merespons tantangan masyarakat modern dengan cara yang kontekstual dan bernuansa dialogis (Banks, 2008).

3. Rekonstruksi kurikulum pendidikan islam berbasis nilai multikultural

Kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan. Dalam kerangka pendidikan Islam multikultural, kurikulum tidak bisa lagi hanya berisi hafalan hukum-hukum fikih atau tafsir literal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi harus menjadi medan integrasi antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Rekonstruksi kurikulum harus diarahkan agar lebih transformatif—yaitu mengaitkan materi keagamaan dengan realitas sosial, seperti isu-isu kemiskinan, kesenjangan, diskriminasi, konflik antar kelompok, dan tantangan hidup bersama dalam masyarakat plural.

Sebagai contoh, dalam pelajaran akidah, siswa tidak hanya diajak memahami rukun iman secara teoretis, tetapi juga bagaimana keimanan mewujudkan dalam tindakan sosial:

menghormati penganut agama lain, menolong sesama, dan membangun masyarakat damai. Demikian pula dalam pelajaran sejarah Islam, tokoh-tokoh yang mempromosikan toleransi seperti Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah, atau para wali yang menyebarkan Islam secara damai di Nusantara, dapat menjadi model keteladanan multikultural.

4. Pengembangan lingkungan sekolah yang inklusif dan demokratis

Lingkungan pendidikan merupakan ruang sosial tempat internalisasi nilai-nilai berlangsung secara alamiah. Maka dari itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kultur sekolah yang inklusif, demokratis, dan egaliter. Sekolah tidak boleh mentoleransi praktik-praktik diskriminatif dalam bentuk apapun—baik terhadap peserta didik dari kelompok minoritas, latar belakang etnis, status sosial ekonomi, maupun perbedaan orientasi budaya dan bahasa. Praktik diskriminatif seperti itu harus dilawan melalui kebijakan internal, penguatan pendidikan karakter, dan pembiasaan perilaku kolektif yang adil.

Program-program seperti forum dialog antar siswa, kegiatan lintas budaya,

pentas seni multikultural, atau pelatihan resolusi konflik dapat menjadi

medium yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai

perbedaan. Selain itu, pembentukan tim konseling atau guru BK yang

berpandangan progresif juga penting dalam membantu siswa yang mengalami

tekanan sosial karena latar belakang mereka.

5. Kolaborasi dengan komunitas dan lembaga sosial keagamaan

Solusi lain yang sangat penting adalah membangun sinergi antara lembaga pendidikan Islam dengan komunitas lokal, organisasi keagamaan, serta lembaga sosial masyarakat yang memiliki visi multikultural. Pendidikan tidak bisa berjalan dalam ruang hampa; ia harus terhubung dengan kehidupan sosial secara langsung. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat, kegiatan sosial lintas iman, atau proyek kemanusiaan bersama dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan nilai-nilai Islam yang terbuka dan inklusif dalam praktik nyata.

Selain itu, kolaborasi ini juga penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat—khususnya orang tua siswa—bahwa pendidikan multikultural bukanlah bentuk “pencairan” akidah, melainkan aktualisasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. Jika masyarakat mendukung, maka proses internalisasi nilai-nilai ini dalam pendidikan akan berlangsung lebih mulus dan berkelanjutan (Mahfud, 2011).

6. Pemberdayaan media pendidikan dan literasi digital islami yang kritis

Di era digital, media memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk cara berpikir peserta didik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus mulai memanfaatkan media pendidikan digital yang berbasis nilai-nilai multikultural, toleran, dan dialogis. Selain mengembangkan konten pembelajaran yang ramah keberagaman, sekolah juga harus membekali siswa dengan kemampuan literasi digital kritis—yakni kemampuan untuk memilah informasi, mengenali hoaks, dan menangkal narasi kebencian yang kerap tersebar di media sosial.

Guru dan siswa harus didorong untuk memproduksi narasi alternatif yang membangun ruang publik yang sehat dan inklusif. Dalam hal ini, integrasi teknologi informasi dalam pendidikan Islam bukan hanya soal alat bantu pembelajaran, tetapi juga bagian dari strategi membangun masyarakat yang terbuka terhadap keragaman melalui pendidikan berbasis media.

7. Advokasi kebijakan pendidikan islam yang pro-multikulturalisme

Solusi strategis jangka panjang adalah mendorong hadirnya kebijakan pendidikan Islam yang secara eksplisit mendukung penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme. Pemerintah dan otoritas keagamaan seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau ormas Islam perlu mengambil langkah afirmatif untuk menyusun pedoman kurikulum, modul pelatihan guru, serta standar akreditasi lembaga pendidikan Islam yang berbasis keberagaman.

Kebijakan afirmatif tersebut bisa mencakup pelibatan komunitas minoritas dalam perencanaan pendidikan, penyediaan bahan ajar lintas budaya, serta penyusunan indikator sekolah inklusif. Tanpa kebijakan yang berpihak secara struktural, maka pendidikan Islam multikultural hanya akan menjadi idealisme konseptual tanpa kekuatan implementatif.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam multikultural merupakan jawaban atas realitas masyarakat Indonesia yang plural, baik dari aspek agama, etnis, budaya, maupun bahasa. Pendidikan Islam tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan aspek ritual dan kognitif semata, tetapi harus bertransformasi menjadi instrumen pembentuk kepribadian yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam multikultural tidak sekadar ideal normatif, tetapi sebuah kebutuhan strategis dalam membangun masyarakat madani yang berkeadaban dan adil dalam keberagaman.

Namun demikian, penerapan pendidikan Islam multikultural menghadapi berbagai tantangan serius. Mulai dari dominasi paradigma keagamaan eksklusif, rendahnya literasi multikultural di kalangan guru, kurikulum yang belum responsif terhadap keberagaman, resistensi ideologis terhadap multikulturalisme, hingga lingkungan sosial-politik yang tidak kondusif. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam belum sepenuhnya menjelma sebagai ruang dialog dan transformasi sosial dalam konteks masyarakat majemuk.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, sejumlah solusi ditawarkan: reorientasi paradigma keislaman ke arah humanisme transendental, penguatan kompetensi guru dalam perspektif multikultural, rekonstruksi kurikulum yang inklusif, pengembangan lingkungan sekolah yang demokratis dan adil gender, kolaborasi aktif dengan komunitas sosial dan antaragama, pemanfaatan media digital yang mendidik, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada pendidikan inklusif. Solusi-solusi ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah internal pendidikan Islam, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap perdamaian sosial dan integrasi nasional.

Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural bukan hanya memungkinkan peserta didik menjadi religius dalam pengertian formal, tetapi juga menjadi manusia yang dewasa secara sosial, mampu hidup berdampingan dalam keragaman, serta aktif menjaga harmoni di tengah perbedaan. Jika dijalankan secara konsisten dan holistik, pendidikan Islam multikultural akan menjadi kekuatan utama dalam merawat keutuhan bangsa serta menjawab tantangan global abad ke-21.

8. Saran

Sebagai tindak lanjut atas temuan dalam kajian ini, penulis menyarankan:

1. Lembaga pendidikan Islam di semua jenjang secara aktif merevisi kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih responsif terhadap realitas keberagaman, dengan menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan universal.
2. Pemerintah dan pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pendidikan multikultural melalui pelatihan guru, pengembangan bahan ajar inklusif, dan sistem evaluasi berbasis keberagaman.

3. Para pendidik dan guru perlu meningkatkan kapasitas literasi multikultural melalui program pengembangan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan, agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan ruang belajar yang adil dan dialogis.
4. Masyarakat dan orang tua juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung nilai-nilai pendidikan multikultural, baik melalui praktik sosial di rumah maupun dalam interaksi sosial di komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2010). *Islam dan Pluralisme: Akhlak Universal untuk Membangun Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Abuddin Nata. (2013). *Perspektif Islam tentang Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Azra, A. (2007). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Pearson.
- Komnas HAM. (2018). *Kondisi Toleransi dan Keragaman di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM RI. Mahfud, C. (2011). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholish Madjid. (1997). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Macmillan.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Zuhairini, et al. (2017). *Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.